

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Perkembangannya dipantau oleh banyak investor dari seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Sektor industri atau manufaktur menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tersebut memiliki kewajiban dalam penyampaian mengenai informasi dari kegiatan yang telah dilakukannya kepada publik dalam bentuk laporan keuangan tahunan (Syarifurakhman, 2016)

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mulai berinvestasi di pasar modal, BEI ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya berinvestasi saham, menaikkan jumlah investor lokal juga menyejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia.

Pengertian investasi menurut (Tandelilin, 2010) adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan

tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Investor memanfaatkan kendaraan investasi untuk mengembangkan uang mereka. Bagi investor, laporan keuangan bisa menjadikan mereka yakin atau tidak untuk memberikan dana investasi tambahan. Hal ini dikarenakan informasi di dalam laporan keuangan bisa memberikan analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor.

Menurut Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Sebelum menanamkan modalnya, investor terlebih dahulu melihat kinerja perusahaan. Investor tentu hanya akan menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penanam modal.

Kinerja perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* dapat dilihat dari laporan keuangan yang di publikasikan untuk umum. Sukses atau tidaknya keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja masing-masing perusahaan dan manajer perusahaan di dalam melaksanakan pertanggungjawabannya. Laporan keuangan seharusnya menjadi cerminan kinerja perusahaan, karena sangat penting bagi investor dalam menaggulangi risiko.

Risiko selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Dalam melakukan bisnis, risiko merupakan hal yang sangat ditakuti. Risiko adalah sesuatu yang tidak pasti atas terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi masa depan dalam proses pencapaian tujuan (Indriyani, 2014). Salah satu cara yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari risiko adalah dengan mengelola risiko. Pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan manajemen risiko. Manajemen risiko yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu diantaranya mencegah terjadinya risiko dan mengurangi akibat yang ditimbulkannya yaitu kerugian. Salah satu aspek penting dalam perusahaan yang melakukan manajemen risiko adalah pengungkapan risiko (Fauzi, 2016).

Pengungkapan risiko harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan perusahaan yang tepat. Pengungkapan risiko perusahaan tidak hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko manajemen. Permintaan para pemegang saham terhadap pengungkapan yang lebih transparan dalam laporan keuangan membuat perusahaan-perusahaan melakukan perluasan terhadap wilayah pengungkapannya dalam laporan keuangan dan tahunan (Anisa, 2012). Dalam *risk disclosure*, ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko pengungkapan, yaitu struktur kepemilikan, *Good Corporate Governance*, dan Ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur.

Yuniati (2016), menyatakan bahwa: Struktur kepemilikan saham adalah proposi kepemilikan manajerial, institusional, dan kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik

antara manajemen dengan pemegang saham. Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Alasan memilih kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan adalah peran manajemen tidak hanya dalam mengelola perusahaan dengan baik tetapi juga mengontrol serta mengawasi jalannya perusahaan. Sehingga semakin besar kepemilikan oleh manajemen maka akan lebih efektif pula dalam memonitoring kegiatan perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat mengurangi konflik agensi, karena peran ganda manajemen dalam mengelola serta mengawasi jalannya perusahaan, mengakibatkan para manajemen lebih selektif dalam mengambil keputusan bagi perusahaan.

Fenomena struktur kepemilikan yang terjadi di Indonesia yaitu aksi merger dan akuisisi. Dikutip dari CNN Indonesia pada tahun 2016, Emiten properti yang tergabung dalam grup Ciputra berencana melakukan proses penggabungan atau merger. Di mana PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Properti Tbk (CTRP) menjadi entitas dari PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Berdasarkan prospektus yang dirilis oleh perusahaan, jumlah saham Ciputra Surya yang dimiliki oleh Ciputra Development sebesar 62,66 persen dari seluruh saham yang telah

ditempatkan dan disetor penuh. Sementara, saham Ciputra Properti yang dimiliki Ciputra Development sebesar 56,3 persen. Dengan penggabungan ini, ketiga emiten akan mendapatkan keuntungan dari struktur perusahaan yang lebih sederhana yang menuju pada peningkatan fleksibilitas operasional dan finansial untuk memperoleh pertumbuhan kesempatan di Indonesia. Selain itu, hasil penggabungan usaha ini dipercaya akan memperkuat emiten-emiten ini sebagai perusahaan real estate tingkat atas di Indonesia.

Selain struktur kepemilikan, faktor yang mempengaruhi risiko pengungkapan yaitu *good corporate governance*. Menurut Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, Kasus GCG Oleh PT Freeport Indonesia Tahun 2017, dikutip dari (Kompas.com), Permasalahan yang terjadi bermula dari adanya ketidak-sesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional (UMR). Meski dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji atau upah yang diberikan, pekerja di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut sangat tidak merata

antara pekerja lokal asli Papua dengan pekerja asing. Dan ironisnya, para pekerja lokal umumnya dipekerjakan di level paling bawah, lain halnya dengan pekerja asing.

Prinsip *good corporate governance* tentang *disclosure and transparency*, menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang. Artinya, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Ini untuk menghindari adanya informasi yang salah serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya.

Setelah struktur kepemilikan dan *good corporate governance*, faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibanding perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Sawir, 2004) dalam (Oktavianti, 2015). Salah satu pengukuran besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari

total penjualan, total aset, jumlah karyawan dan nilai kapasitas pasar dalam *annual report*, semakin besar ukuran tersebut, semakin besar pula ukuran perusahaan.

Dalam *annual report*, para investor kebanyakan akan terlebih dahulu melihat ukuran perusahaan. Karena ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan investasi. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Meningkatnya total aset diikuti dengan meningkatnya modal yang ditanam sehingga tingkat penjualan semakin tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan. (Utami, 2015).

Fenomena ukuran perusahaan pada Bank Mandiri yaitu kasus fasilitas kredit bagi PT Tirta Amarta Bottling (PT TAB), yang merupakan nasabah PT Bank Mandiri Tbk. Kasus bermula saat Direktur PT TAB pada 15 Juni 2015, berdasarkan Surat Nomor: 08/TABco/VI/205, mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri *Commercial Banking Center* Bandung. TAB mengajukan perpanjangan seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp 880,60 miliar. PT TAB juga mengajukan perpanjangan dan tambahan plafond LC sebesar Rp 40 miliar, sehingga total plafond LC menjadi Rp 50 miliar. Adapula fasilitas Kredit Investasi (KI) senilai Rp 250 miliar selama 72 bulan. Kasus ini kini telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, karena kasus ini negara telah dirugikan triliunan rupiah. (kontan.co.id).

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Alasan memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Perusahaan manufaktur juga memiliki kompleksitas operasi yang tinggi serta merupakan sektor terbesar di Bursa Efek Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, struktur kepemilikan, *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko adalah, struktur kepemilikan manajerial membuat manajemen mempunyai peran ganda sebagai pemilik dan pengelola. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dan memperbolehkan untuk menggunakan dan mengelola harta pribadinya tersebut dengan berbagai usaha dengan syariat. *Good corporate governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah laku dalam tata kelola perusahaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. *Good Corporate Governance* mempunyai beberapa prinsip yang salah satunya yaitu tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal. Ukuran perusahaan menunjukkan semakin besar aset yang kita miliki, semakin besar pula risiko yang timbul sehingga pengungkapan risiko yang ada akan semakin luas, serta semakin besar cobaan yang diterima maka semakin besar pahala yang di dapat.

Risiko selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Konsep ketidakpastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangannya

yang positif. Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi dimasa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian dimasa depan. Dengan demikian, resiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas resiko. Secara keseluruhan, struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko secara menyeluruh dalam setiap variabel yang mendukung sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis mengambil judul **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *RISK DISCLOSURE* DAN TINJAUANNYA DALAM SUDUT PANDANG ISLAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dititik beratkan pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *risk disclosure*?
2. Apakah struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *risk disclosure*?

3. Bagaimana struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *risk disclosure* dalam sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *risk disclosure*.
2. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *risk disclosure*.
3. Untuk mengetahui bagaimana struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *risk disclosure* dalam sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pihak lain.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, sebagai evaluasi dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan risiko.

- b. Sebagai tambahan pengetahuan dalam mengatasi *risk disclosure* dalam suatu perusahaan terutama perusahaan manufaktur dan menambah referensi tentang *risk disclosure* bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengungkapan risiko.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi kepada para investor maupun kreditor untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan keuangan mengenai risiko. Dan juga melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi dan pemahaman tentang pengungkapan risiko untuk membantu memperbaiki praktek pengungkapan risiko di perusahaan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil-hasil informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan umumnya, khususnya pengungkapan risiko sebagai bahan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang saling berhubungan.